

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Sukirno (2010) pengangguran dijelaskan sebagai kondisi seseorang yang masuk pada golongan angkatan kerja yang menginginkan memperoleh pekerjaan tapi pekerjaan tersebut belum didapatkannya. Hal ini dikarenakan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan tersebut terlihat pada jauh lebih tingginya laju pertumbuhan penduduk (angkatan kerja) dibanding dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan, yang mengakibatkan tidak terserapnya semua angkatan kerja.

Pada negara Indonesia, justru lebih banyak angka pengangguran di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh pihak angkatan kerja yang tidak memiliki keahlian dalam beradaptasi dengan teknologi, yang dimana keahlian tersebut sangat dibutuhkan oleh industri teknologi. Permasalahan terkait pengangguran ini memiliki dampak yang sangat buruk (Sukirno, 2010). Salah satu dampak yang diakibatkan adanya pengangguran adalah kemiskinan yang nantinya akan berimbas buruk terhadap kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Sejak zaman dahulu salah satu masalah utama yang dialami manusia yaitu kemiskinan. Serta di berbagai negara manapun fenomena ini merupakan masalah utama yang terjadi dan

sudah ada dari peradaban manusia sampai saat ini. Kemiskinan bukanlah sebuah fenomena sosial khusus yang terjadi pada masyarakat dengan latar belakang agama serta suku bangsa, tetapi sebuah fenomena yang memiliki sifat umum. Akan tetapi dengan kemiskinan martabat sebuah negara bisa diukur (Mulyadi, 2014).

Penyebab kemiskinan jika dilihat dari teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*), lingkaran kemiskinan ialah sebuah rangkaian kekuatan yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap sebuah keadaan dimana sebuah daerah tetap akan menjadi miskin serta banyak merasakan kesulitan guna mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik lagi setra produktif. Rendahnya pendapatan pada daerah tersebut disebabkan oleh rendahnya produktivitas dan mengakibatkan tabungan serta investasi yang rendah yang membuat rendahnya proses pembuatan lapangan pekerjaan. Akumulasi modal yang rendah diakibatkan dari keterbelakangan dan seterusnya (Kuncoro dan Mudrajad, 2010).

Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Pemerintah Indonesia mengupayakan agar masyarakat menjadi adil dan makmur dengan menggunakan pembangunan nasional. Laju penurunan jumlah masyarakat miskin merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilannya sebuah pembangunan nasional. Pada pemilihan strategi pembangunan, efektivitas untuk menurunkan jumlah penduduk miskin

merupakan pertumbuhan utamanya. Dengan ini efektivitas untuk menurunkan penduduk miskin ialah salah satu kriteria utama pemilihan titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional (Wijayanto, 2010).

Negara bertanggung jawab penuh mengenai orang miskin dan anak terlantar hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1). Amanat ini menegaskan bahwa masalah kemiskinan merupakan salah satu peristiwa utama yang wajib dijadikan program pembangunan negara ini (Ginting, 2015). Dengan demikian diperlukan sebuah proses pembangunan serta pertumbuhan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuncoro (2010) ialah wujud kondisi sebuah perekonomian di suatu daerah yang memiliki kesinambungan dan kemakmuran rakyat bisa meningkat, dimana pertumbuhan 3 ekonomi ditandai dengan peningkatan pada jumlah barang serta jasa yang didapati dari sebuah daerah.

Pengertian pembangunan menurut Todaro (2003) ialah sebuah kenyataan fisik sekaligus tekad yang ada pada masyarakat dalam berusaha dengan keras melalui rangkaian berbagai macam proses sosial, ekonomi, serta institusional guna tercapainya kehidupan yang lebih baik.

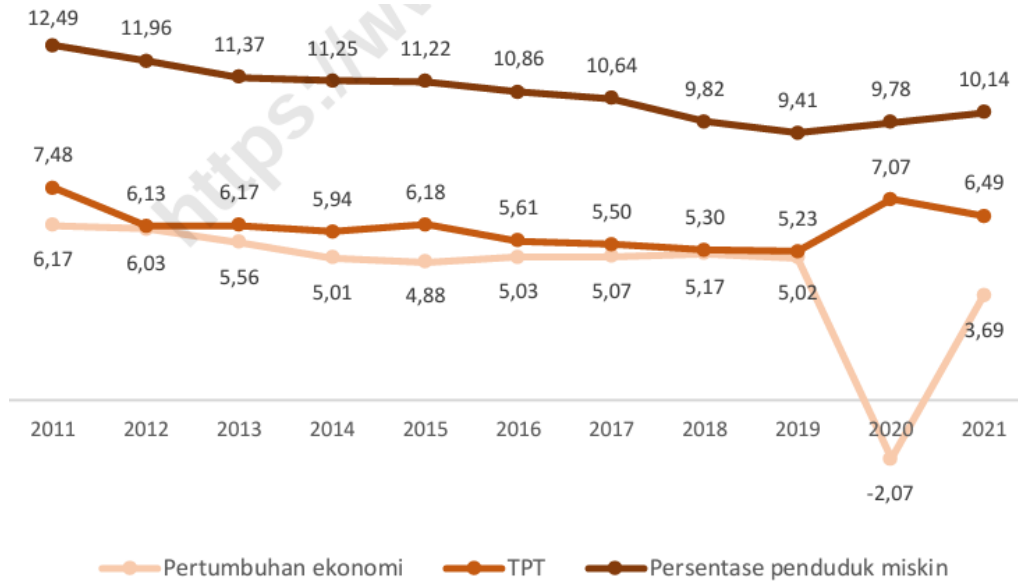
Sedangkan menurut Naf'an (2014) pembangunan nasional ialah pembangunan ekonomi yang ada di sebuah negara atau wilayah. Tingginya pertumbuhan ekonomi serta meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu faktor agar pembangunan nasional bisa dijalankan.

Pertumbuhan ekonomi serta distribusi output dan struktur ekonomi yang mengalami perubahan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi (Purnamasari, 2017). Tujuan lain dari pembangunan ekonomi yaitu agar seluruh lapisan masyarakat dalam kesejahteraannya bisa mengalami peningkatan (Hendrani, 2013).

Selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, pembangunan ekonomi juga memiliki tujuan lain yaitu untuk mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan dan membentuk lapangan pekerjaan untuk para penduduk. Karena masyarakat bisa mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja (Todaro, 2006).

Sjafrizal (2012) mengemukakan ketimpangan pembangunan ekonomi ialah fenomena umum pada proses pembangunan ekonomi daerah. Ketimpangan tersebut berawal dari perbedaan isi demografi pada wilayah masing-masing. Perbedaan tersebut berdampak kepada keahlian daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong jalannya pembangunan. Maka dari itu, tidak heran jika daerah tertentu memiliki wilayah maju (*developed region*) serta wilayah relatif (*underdeveloped region*).

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Tahun 2011-2021



Pada awal pandemi terjadi, banyak penduduk kehilangan pekerjaan seiring pembatasan dan penutupan beberapa sektor ekonomi. Akibatnya, pekerja kekurangan jam kerja dan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dan setengah penganggur meningkat. Tingkat pengangguran dan setengah penganggur yang meningkat menyebabkan kemiskinan juga meningkat. Seiring pemulihan ekonomi pada tahun 2021, tingkat kesejahteraan mengalami perbaikan yang salah satunya tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan. Secara persentase, penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 berada di level 9,71 persen atau menurun dari kondisi September 2020 sebesar 10,19 persen dan Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Dari segi jumlah penduduk miskin pada September 2021 menurun 1,05 juta jiwa, dibandingkan dengan September 2020 dan menurun 1,04 juta jiwa dibandingkan Maret 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022). Penurunan penduduk miskin tidak lepas dari program perlindungan sosial yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat rentan yang terdampak pandemi (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Namun, dikarenakan pemerintah

fokus terhadap penanggulangan pandemi di Indonesia, sehingga perekonomian yang terjadi tahun 2020-2022 dapat dikatakan sebagai kondisi anomali fiskal, karena APBN dalam periode tersebut merupakan manifestasi strategi fiskal yang dirancang untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional (CNBC Indonesia.com, 2023).

Sjafrizal (2012) menyebutkan bahwasanya ketimpangan pembangunan ekonomi ialah fenomena umum yang ada di sebuah daerah pada proses pembangunan. Penyebab awal terjadinya ketimpangan pembangunan yaitu terdapatnya perbedaan kandungan demografi yang ada di setiap wilayah. Perbedaan ini mengakibatkan juga pada kemampuan sebuah daerah yang menjadi berbeda dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong proses pembangunan. Dari hal tersebut maka timbul di sebuah daerah terdapat *developed region* (wilayah yang maju) dan *underdeveloped region* (wilayah terbelakang).

Ketimpangan sering terjadi di provinsi itu sendiri (Noegroho & Soelistianingsih, 2008). Fokus pembangunan yang hanya pada satu aspek menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Program untuk mengatasi isu yang timbul semacam ketimpangan pendapatan serta ketimpangan antar suatu daerah yang belum memiliki dampak nyata guna mengatasinya sudah diluncurkan. Sampai-sampai kebijakan yang sudah disiapkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi juga tidak memiliki dampak yang baik, dikarenakan juga memiliki kontribusi pada sebuah ketimpangan pendapatan serta ketimpangan wilayah.

Gambaran dari kondisi pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. 1 Gini Ratio Menurut Provinsi Tahun 2017-2021 (dalam persen)

Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	0.32	0.31	0.32	0.31	0.32
Sumatera Utara	0.33	0.31	0.31	0.31	0.31

Provinsi	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera Barat	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30
Riau	0.32	0.34	0.33	0.32	0.32
Jambi	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31
Sumatera Selatan	0.36	0.34	0.33	0.33	0.34
Bengkulu	0.34	0.35	0.32	0.32	0.32
Lampung	0.33	0.320	0.33	0.32	0.31
Kep. Bangka Belitung	0.27	0.27	0.26	0.25	0.24
Kep. Riau	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33
DKI Jakarta	0.40	0.39	0.39	0.40	0.41
Jawa Barat	0.36	0.35	0.35	0.35	0.36
DI Yogyakarta	0.44	0.42	0.42	0.43	0.43
Indonesia	0.39	0.38	0.38	0.38	0.38

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Menurut tabel di atas bisa dilihat bahwasanya ketimpangan di antara masyarakat pada wilayah Sumatera Selatan diukur memakai index gini ratio menggapai 0.34% dengan kategori sedang. Tren naik turun provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat gini rasio yang bersifat fluktuatif dalam indeks gini. 0,36 persen. Pada tahun 2017 index gini turun menjadi 0,34%, lalu turun lagi hingga 2020 dan 2018. Akan tetapi, pada tahun 2021 indeks gini naik menjadi 0,34%. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya terdapat ketimpangan sedang di Sumatera Selatan pada pendistribusian pendapatan serta pertumbuhan ekonomi, hal tersebut membuktikan bahwa di Sumatera Selatan pertumbuhannya belum merata ke seluruh masyarakatnya atau bisa dikatakan timpang.

Pada masalah ketimpangan, indeks gini dibutuhkan guna menilai tingkat ketimpangan pendapatan. Indeks gini terdiri dari nilai 0 dan 1. Ketimpangan pendapatan merata sempurna apabila indeks gini = 0, dengan artian masing-masing orang mendapat pendapatan dengan jumlah yang sama. Ketimpangan pendapatan berupa tumbuhan palmase serta kayu rawa (bakau) apabila indeks gini = 1, memiliki karakteristik yang sempurna.

Provinsi Sumatera Selatan wilayahnya berada di bagian selatan Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Selatan secara tipografi lokasinya ada di pantai timur, kondisi tanahnya berupa rawa dan air payau yang dipengaruhi pasang surut. Lapangan usaha yang ada di wilayah kota secara umum berupa non pertambangan serta non pertanian. Sedangkan lapangan usaha yang terdapat di kabupaten yaitu berupa perambangan serta pertanian. PDRB memperoleh sumbangan yang cukup besar dari 3 sektor. 3 sektor yang memberikan sumbangan terbesar pada tahun 2021 yaitu dari sektor pertambangan dan penggalian, kehutanan, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Pada tahun yang sama, peran setiap sektor tersebut secara berurutan yaitu 19,92%, 19,46%, 15,12%. Potensi unggulan yang ada di Sumatera Selatan secara keseluruhan didominasi oleh sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, tanaman pangan, perikanan, peternakan), kehutanan, pertambangan dan energi.

Kemudian angka ketimpangan pada Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indeks gini yang dapat dilihat dari tabel 1 diatas menunjukkan angka ketimpangan pendapatan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,36 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,33. Penurunan angka ini berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Agar dapat melakukan kebijakan yang sesuai dengan sasaran, maka terlebih dahulu pihak yang berwenang harus mengetahui faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan di daerah tersebut seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Patra, Afriansyah dan Hapid (2022), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mara Judan Rambey (2018), yang pada penelitiannya

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pertumbuhan.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Puti Andiny dan Pipit Mandasari (2017), yang pada penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi hanya mempengaruhi ketimpangan pembangunan sebesar 2 %. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Yeniwati dan Novya Zulva Riani (2012), yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pembangunan.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Malik Ibrahim (2019), yang pada penelitiannya menyatakan bahwa ketimpangan pembangunan dipengaruhi pengangguran. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Liling Vera Yusica (2018), yang ada penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu penelitian ini memasukkan ketiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran menjadi variabel independen dan ketimpangan pembangunan menjadi variabel dependen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, pertanyaan yang kemudian layak dikemukakan adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran secara bersamaan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran secara bersamaan terhadap ketimpangan pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang dimana hal ini akan menyebabkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menjadi kota yang sejahtera.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu mengenai ketimpangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh keduanya dengan kemiskinan.